

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Teori Keagenan dan Teori Sinyal**

Michelson *et al* (1995) mendefinisi keagenan sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, yang dalam hal ini manajemen (*agent*) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain yaitu pemilik (*principal*). Pemilik akan mendelegasi tanggung jawab kepada manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik.

Prinsipal dan agen diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, agen tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan agen juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan principal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen (Faozi, 2002).

Hubungan antara agen dan prinsipal akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asymmetrical information*). Apabila beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata diantara agen dan prinsipal, serta tidak mungkin prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agen. Hal ini menyebabkan agen cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*).

Manajemen mempunyai informasi akurat mengenai nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar maka informasi tersebut akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal adanya peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Informasi yang disampaikan manajemen perusahaan tersebut dapat berupa laporan keuangan. Informasi laba yang dilaporkan manajemen merupakan sinyal mengenai laba di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan dapat membuat prediksi atas laba perusahaan di masa yang akan datang (Assih, 2000).

Jika informasi laba tersebut relevan bagi para pelaku pasar modal, maka informasi ini akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya akan terjadi respon/reaksi pasar berupa perubahan harga saham perusahaan yang bersangkutan ke harga ekuilibrium yang baru. Harga ekuilibrium ini akan bertahan sampai ada informasi

baru lainnya yang akan merubah harga saham kembali ke harga ekuilibrium yang baru (Jogiyanto, 2000).

## **2.2 *Good Corporate Governance***

### **2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance***

*Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang bertujuan mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka. Singkatnya *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002).

Tujuan *Corporate Governance* menurut FCGI (2002) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*shareholders*). Tujuan *corporate governance* lainnya adalah :

1. pemenuhan tujuan strategis perusahaan berupa peningkatan nilai saham dan value perusahaan.
2. pemenuhan tanggung jawab kepada stakeholders khususnya komunitas setempat.
3. dipatuhinya rerangka yuridis yang ada.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholders yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, dan akurat serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara tepat, akurat, dan transparan

mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (YPPMI & SC, 2002).

### **2.2.2 Manfaat Penerapan GCG**

Menurut *Forum for Corporate Governance* di Indonesia, terdapat empat tujuan dari *corporate governance* :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik
2. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya khususnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan dividen.

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik. Di samping itu perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen.

Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara

universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya.

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip GCG**

Berdasarkan pada Pedoman Umum GCG (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), prinsip pokok dalam *corporate governance* dibagi menjadi lima yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, serta keadilan dan kewajaran. Adapun penjelasan prinsip-prinsip tersebut antara lain :

#### **(a) Akuntabilitas (*accountability*)**

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

#### **(b) Tanggung Jawab (*responsibility*)**

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Pengelola perusahaan hendaknya menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan

yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

**(c) Transparansi (*transparency*)**

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

**(d) Keadilan (*fairness*)**

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**(e) Kemandirian (*independency*)**

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-

hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

#### **2.2.4 Pengukuran *Good Corporate Governance***

Timbulnya banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Skandal manipulasi akuntansi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Kimia Farma dan Bank Lippo yang dahulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi. Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal auditor salah satunya dialami oleh Enron, cukup membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam. Hal ini menimbulkan fakta bahwa mekanisme *corporate governance* yang baik belumlah diterapkan. Hal ini dapat menjadi pemicu perilaku manajemen untuk mengeluarkan informasi yang berdampak positif terhadap harga saham dan mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu guna menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan Herawaty, 2007). Untuk itu diperlukan suatu mekanisme teratur dan disiplin agar GCG dapat diterapkan dengan baik.

Mekanisme *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan haruslah mampu mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dengan benar. Sistem keuangan yang baik akan menghasilkan informasi yang luas, kredibel, dan murah yang dapat memfasilitasi pemantauan oleh pemegang saham secara efektif, memungkinkan dewan komisaris

meningkatkan nilai pemegang saham melalui pemberian saran dan penentuan keputusan manajerial (Khomsiyah *et al.*, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan merupakan salah satu kunci dalam mekanisme *corporate governance* yang berfungsi meningkatkan akuntabilitas dan nilai perusahaan.

Bapepam LK dan BEJ yang sekarang berubah menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya memperbaiki *corporate governance* dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam *code for good corporate governance* dan peraturan yang berkaitan dengan *corporate governance*, yaitu Keputusan Direksi PT BEJ Nomor Kep 315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT BEJ Nomer Kep 339/BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang dalam hal ini perusahaan yang tercatat wajib memiliki :

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite Audit
3. Sekretaris perusahaan

## **2.3 Earnings Management**

### **2.3.1 Pengertian Earnings Management**

*Earnings Management* atau manajemen laba adalah suatu intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi (Wolk *et al.*, 2001). Dalam kondisi perusahaan akan menjual sahamnya



kepada publik, manajer perlu memberikan informasi kepada publik mengenai kondisi keuangan perusahaannya. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan *earnings management*. Kondisi ini terjadi, baik pada saat perusahaan melakukan penawaran perdana (*initial public offerings/IPO*) maupun pada saat melakukan penawaran kedua dan seterusnya (*seasoned equity offerings/SEO*).

*Earnings Management* berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba (*earnings*) atau prestasi usaha suatu organisasi. Hal ini tidaklah aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen disamping memang suatu hal yang lazim bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh. Oleh sebab itu manajer sering berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan laba yang dicapai.

Pemanipulasian data dalam laporan keuangan tersebut dapat berupa praktik manajemen laba (*earning management*). Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus (Scott, 1997 dalam Wahyuningsih, 2007).

Lebih lanjut Scott mengemukakan bahwa manajemen laba dapat berupa:

- *Taking a bath*

Manajemen melakukan metode *taking a bath* dengan mengakui biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang pada periode berjalan ketika pada periode berjalan terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan.

- *Income minimization*

Manajer melakukan praktik manajemen laba berupa *income minimization* dengan mengakui secara lebih cepat biaya-biaya, seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan, ketika perusahaan memperoleh profit yang cukup besar dengan tujuan untuk mengurangi perhatian politis.

- *Income maximization*

*Income maximization* merupakan upaya manajemen untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan.

- *Income smoothing*

*Income smoothing* merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, sehingga perusahaan tampak lebih stabil dan tidak berisiko.

### **2.3.2 Peluang Manajemen Melakukan *Earnings Management***

Peluang atau kesempatan bagi manajemen laba untuk melakukan manajemen laba timbul karena:

1. Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Worthley (1984) dalam Setyawati (2000) mengungkapkan fleksibilitas dalam manajemen laba disebabkan oleh metode akuntansi yang memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda dan metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi.
2. Informasi asimetris antara manajer dengan pihak luar (Healy dan Palepu, Ensenhardt, dalam Setyawati, 2000). Manajer relatif memiliki lebih

banyak informasi dibandingkan dengan pihak luar termasuk investor. Mustahil bagi pihak luar untuk dapat mengawasi semua perilaku dan keputusan manajemen.

### **2.3.3 Pemicu *Earnings Management***

Faktor-faktor pemicu *earning management* menurut Setyawati (2000) yaitu :

1. Dalam kontrak antara manajer dan pemilik (melalui kompensasi).  
Kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi para manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan besarnya bonus yang akan diperoleh.
2. Sebagai sumber informasi bagi investor di pasar modal.  
Sebagai suatu perusahaan, akan mencoba membuat laporan keuangan secara agresif pada saat pertama kali *go public* agar dapat menarik calon investor.
3. Dalam kontrak utang.  
Salah satu persyaratan dalam pemberian kredit seringkali mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan tingkat rasio modal kerja minimal, *rasio debt to equity* minimal, maksimum pemberian dividen ke pemegang saham, atau batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi perusahaan.
4. Oleh pesaing  
Kondisi laporan keuangan diunakan untuk menentukan keputusan ambil alih ataupun untuk penetapan strategi persaingan.
5. Oleh karyawan kenaikan laba perusahaan digunakan untuk meminta kenaikan upah, dan lain sebagainya.

### **2.3.4 Teknik Merekayasa Laba**

Teknik merekayasa laba menurut Setiawati (2000) adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain, estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aset tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : mengubah depresiasi aset tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Metode ini juga disebut juga dengan manipulasi keputusan operasional.

Contohnya rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya (Delay dan Vigeland, 1993 dalam penelitian Setyawati, 2000).

### **2.4. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Earnings Management***

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda

di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Irfan, 2002) sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu pihak yang merupakan bagian terpenting dari terlaksananya konsep GCG ini adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon dalam FCGI, 2008) karena dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan *earnings management* atau manajemen laba.

#### **2.4.1 Hubungan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba**

Saat ini telah banyak penelitian mengenai efektifitas *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap manajemen laba, antara lain: Hastuti (2005), Ujjiyantho dan Pramuka (2007), Isnanta (2008), Mintara (2008). Hasil yang diungkapkan pun berbeda-beda, antara lain: menurut Ujjiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba artinya keberadaan komisaris independen pada dewan komisaris akan mengurangi tindakan manajemen laba. Namun pendapat tersebut bertolak

belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnanta (2008) dan Mintara (2008) bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan penerapan *corporate governance* baru dirasakan dampaknya dalam waktu yang panjang, setelah semua aturan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dalam penyesuaian ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Hastuti (2005) bahwa perusahaan sebagian besar melakukan manajemen laba melalui *income decreasing*. Hal ini diduga dilakukan untuk kepentingan penghindaran pajak.

Penelitian lain yang berhubungan dengan GCG dan EM juga dilakukan oleh Herawaty (2008) yang meneliti tentang pengaruh variabel *corporate governance* yang dilihat dari kualitas audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu dikemukakan juga bahwa *earnings management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Turi Sriwedari (2009) juga melakukan studi apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba dan apakah manajemen laba berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit memberikan

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba, dan manajemen laba memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ferdawati (2009) dalam studinya tentang pengaruh manajemen laba real terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel pemoderasi melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh manajemen laba real terhadap nilai perusahaan dan pengaruh praktik tata kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara manajemen laba real dengan nilai perusahaan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba real berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun demikian hasil uji untuk pengaruh praktik tata kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara manajemen laba real dengan nilai perusahaan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan bukan variabel pemoderasi hubungan antara manajemen laba real terhadap nilai melainkan hanya sebagai variabel independen.

Murhadi (2009) dalam studinya tentang pengaruh GCG Terhadap Praktik *Earnings Management* pada Perusahaan Terdaftar di BEI juga meneliti tentang apakah praktik GCG berpengaruh signifikan positif terhadap praktik EM yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa praktik GCG berpengaruh signifikan terhadap praktik EM yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Namun dari lima indikator GCG yakni komite audit, komisaris independen, *CEO duality*, *Top Share* dan koalisi pemegang saham, yang berpengaruh signifikan hanya dua yakni *CEO duality* dan *Top Share*.

#### **2.4.2 Hubungan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba**

Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbentuk PT, pemisahan fungsi antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal sedangkan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan besar, sifat kegiatan dan peraturan yang berlaku. Demikian juga tingkah laku masing-masing dapat saling tidak mendukung kepentingan perusahaan. Pada dasarnya, pemodal tidak dapat secara langsung berhubungan dengan pengelola terutama pada perusahaan besar, dalam keadaan seperti ini, hubungan kelembagaan dewan komisaris diperlukan, sebagai suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat terjamin. Adanya komisaris independen yang proporsional akan mewakili jumlah kepemilikan untuk setiap pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat direksi.

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawaty, 2007). Secara teori fungsi dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perseroan. Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Sedangkan misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders*



sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Sehingga harus ada tolak ukur penilaian kinerja dewan komisaris.

Dalam konstruksi hukum perseroan terbatas, kinerja perseroan adalah indikator performa *board of director*. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa *board of director* menjalankan fungsi kepengurusan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Menurut *Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance* (2004), tugas komisaris independen adalah :

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholders* yang lain.
- c. Mengungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Adapun kriteria formal yang harus dipenuhi oleh komisaris independen untuk memastikan dapat menjalankan tugasnya secara independen adalah :

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
- d. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- f. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- g. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
- h. Tidak menjadi mitra atau prinsipal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- i. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan dewan komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.

- j. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
- k. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.
- l. Diharapkan pemilihan orang yang tepat sebagai komisaris independen dapat membantu penerapan dan penciptaan efektivitas dari praktik GCG.

Dalam penelitian ini, komisaris independen dapat diukur dengan presentase antara jumlah komisaris independen yang bekerja dalam perusahaan terhadap total dewan komisaris. Dengan adanya komisaris independen dalam mekanisme GCG, diharapkan dapat membuat penerapan GCG lebih efektif dan transparan sehingga kreditor dan investor akan lebih mempercayai kredibilitas perusahaan dan meminta return yang rendah atas investasi dan pinjaman yang telah mereka berikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah :

Hipotesis 1 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik

*Earnings Management*

### **2.4.3 Hubungan Komite Audit terhadap Manajemen Laba**

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa simpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar dapat melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

Utama dan Leonardo (2006) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali dari pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan survey atas komite audit perusahaan yang listing di BEJ. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit secara signifikan selain komposisinya, diantaranya kekuatan mengendalikan perusahaan oleh pemegang saham, makin banyaknya perwakilan komisaris independen dalam dewan komisaris, pengendalian oleh dewan komisaris, dan lamanya komite audit menjabat.

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian oleh Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001- 2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut.

Wedari (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang listing di BEJ untuk tahun 1994 hingga 2002, Wedari (2004) menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian lain yang serupa, artinya dengan adanya dewan komisaris dan komite audit tidak dapat mengurangi manajemen laba karena dengan mereka, manajer dapat melakukan manajemen laba dengan lebih leluasa.

Setiawan (2006) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba (*earnings response coefficient*), artinya dengan adanya komite audit maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Wilopo (2004) menganalisis hubungan dewan komisaris independen, komite audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* diatas penting untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (*fair*) dan transparan. Karena adanya ketidakkonsistenan hasil, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *Earnings Management*.

#### **2.4.4 Hubungan *Top Share* dengan Manajemen Laba**

Berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan yang ditemukan, La Porta *et al.* (1998,1999) dan Claessens *et al.* (1999a) mengemukakan masalah keagenan yang harus diperhatikan dalam perusahaan modern adalah masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan minoritas terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Claessens *et al.* (1999b) memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dengan data asia, La Porta *et al.* (2002), Claessens *et al.* (2002), Burkart *et al.* (2003), Joh (2003), Kappler and Love (2004), serta Durnev dan Kim (2005) memperlihatkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas baik langsung atau tidak langsung.

Indra dan Ivan (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar kepada *outside investors* perlu menerapkan *corporate*

*governance* untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemegang saham publik dalam rangka menyeimbangkan pihak manajemen. Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang memiliki kontrol pada segelintir pemegang saham perlu menerapkan *corporate governance* untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul antara pengendali perusahaan dan *outside investor* (pemegang saham publik).

Jadi berdasarkan pada pemikiran dan permasalahan yang ada, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 3 : *Top Share* berpengaruh positif terhadap praktik

*EarningsManagement*.